



Term of Reference

Talk Show dan Press Conference: “Perjuangan Mempertahankan Hutan Alam di Kepulauan Aru”

Latar Belakang

Kabupaten Kepulauan Aru merupakan sebuah Kabupaten Kepulauan yang terletak di timur Indonesia, tepatnya di Tenggara propinsi Maluku dan berbatasan langsung dengan negara Australia. Kepulauan Aru terdiri lebih dari 180 gugusan pulau, dengan lima pulau besar yang menjadi daratan utama, yaitu: Trangan, Kobror, Wokam, Maikor dan Kola. Pulau-pulau ini disekat oleh hampir seratusan selat besar dan kecil. Berdasarkan analisis Citra Landsat-8 liputan tahun 2013, Kepulauan Aru sebagian besar terdiri dari hutan alam. Lebih dari 80 persen atau seluas 667.000 hektare merupakan hutan dataran rendah dan hutan mangrove dengan kondisi sangat baik.¹ Beberapa jenis pohon yang terdapat di kepulauan tersebut adalah kayu Merbau (*Itsia bijuga*), kayu Kenari (*Canariu mamboinense*) kayu Gofasa (*Vitex cofassus*), kayu Merah (*Eugenia Rumphii*), dan kayu Bawang (*Dysoxyl um euphlebiium*).²

Kekayaan alam Kepulauan Aru sudah dikenal dunia luar sejak berabad-abad lalu. Kepulauan Aru sudah tidak asing dengan pengusaha sumberdaya laut dan hutan berskala besar. Perusahaan mutiara dan penangkapan/ pengolahan ikan mengawali sejarah eksploitasi sumberdaya alam di Kepulauan Aru. Sejak tahun 1980-an orientasi pengusaha sumberdaya alam meluas ke sumberdaya hutan, khususnya kayu. Kemudian meluas lagi pada sumberdaya lahan, terutama di sektor perkebunan dan hutan tanaman. Tidak bisa dipungkiri bahwa Pemerintah daerah harus memiliki pendapatan yang memadai untuk membiayai pembangunan di daerahnya. Apalagi di atas hamparan kekayaan sumberdaya alam, Kabupaten Kepulauan Aru tercatat sebagai salah satu kantong kemiskinan di Provinsi Maluku. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2011 tercatat 30,96 persen dari penduduk Kepulauan Aru berada di bawah garis kemiskinan.³

Gencarnya pembangunan akan berbanding lurus dengan besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sementara pola yang paling umum untuk meningkatkan PAD adalah membuka peluang masuknya investasi berskala besar ke daerahnya. Namun kebijakan pemerintah terkait keuangan daerah ini acap kali menafikan kondisi spesifik daerah dan daya dukung lingkungan yang ada. Jika merujuk pada potensi sumberdaya laut Kepulauan Aru, terlihat bahwa potensi di sektor kelautan sangat besar. Bahkan

¹ Analisis Citra FWI

² Hidayat, H. 2000. *Forest Management by the Local Peoples in Aru District, Southeast Maluku*. Unpublished Manuscript, LIPI 154-63.

³ Menyongsong Kiamat Ekologis di Kepulauan Aru (<http://savearuisland.com/2013/10/23/menyongsong-kiamat-ekologis-di-kepulauan-aru/>) akses tanggal 23 oktober 2013

produksi dan nilai ekonomi pada sektor ini selalu meningkat setiap tahunnya. Alih-alih mengembangkan sektor perikanan, nampaknya Pemerintah Daerah justru lebih memberi ruang bagi investasi berbasis lahan dan membuka hutan di daratan Kepulauan Aru.

Sejak tahun 2010, Pemerintah Daerah melalui Bupati Kepulauan Aru mulai memberikan lampu hijau bagi masuknya perusahaan-perusahaan perkebunan skala besar, dengan menerbitkan izin lokasi dan rekomendasi pelepasan kawasan hutan. Gubernur Maluku juga telah memberikan persetujuan terhadap rekomendasi ini. Proses perizinan perkebunan sudah mendekati tahap pelepasan kawasan hutan yang persetujuannya di tangan Menteri Kehutanan. Permohonan tersebut dilakukan oleh kongsorsium Menara Group melalui sejumlah anak perusahaannya yang berniat membuka perkebunan Tebu seluas kurang lebih 480.000 hektare.

Akibat Rencana tersebut, masyarakat Kepulauan Aru tergerak untuk melakukan penolakan secara besar-besaran terhadap wacana yang dapat mengancam kelestarian hutan-hutan di Kepulauan Aru. Penolakan yang dilakukan oleh masyarakat kepulauan aru mendapat dukungan dari berbagai macam pihak, baik di nasional maupun internasional. Semakin gencarnya dukungan yang diberikan untuk masyarakat Kepulauan Aru membuat sulitnya perusahaan yang ingin mengeksploitasi hutan aru masuk kewilayah tersebut. Atas dasar itu juga pada tanggal 10 April tahun 2014 menteri kehutanan menyatakan telah membatalkan izin prinsip pencadangan kawasan hutan yang dimohonkan oleh Menara Grup. Pembatalan tersebut diduga karena pihak Menara Grup telah melewati batas waktu yang ditentukan oleh Kementerian Kehutanan untuk melakukan penataan batas arealnya. Adanya aktivitas penolakan yang sangat kuat dari masyarakat membuat pihak Menara Grup tidak dapat melaksanakan tahapan-tahapan yang ada dalam proses pelepasan kawasan hutan.

Meskipun Kementerian Kehutanan telah membatalkan izin Menara Grup di Kepulauan Aru, bukan berarti Kepulauan Aru sudah lepas dari berbagai macam ancaman eksploitasi sumber daya alam. Penguatan masyarakat dan pemantauan kondisi hutan di Kepulauan Aru harus tetap dilakukan. Perlindungan terhadap ekosistem pulau-pulau kecil di Kepulauan Aru pun menjadi sesuatu yang mutlak dilakukan guna menjaga kelestarian laut, hutan dan budaya masyarakat di Kepulauan Aru.

Kasus yang terjadi di Kepulauan Aru merupakan bagian kecil dari permasalahan yang terjadi di pulau-pulau kecil di Indonesia. Permasalahan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat adat, perusahaan tambang dengan masyarakat adat, perusahaan HTI dengan masyarakat adat dan HPH dengan masyarakat adat menjadi permasalahan yang belum dapat diselesaikan di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, Forest Watch Indonesia (FWI) bermaksud menyelenggarakan Talk Show dan Press Conference untuk mengangkat kisah masyarakat kepulauan Aru dalam mempertahankan kelestarian hutan di pulau-pulau kecil Aru. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan adanya strategi untuk memperkuat masyarakat dalam menjaga hutan-hutan di kepulauan Aru. Selain itu perjuangan masyarakat aru juga dapat dijadikan pembelajaran pergerakan masyarakat di Indonesia dalam menjaga hutan di Indonesia.

Tujuan

Pelaksanaan Talk Show dan Press Conference “**Perjuangan Mempertahankan Hutan Alam di Kepulauan Aru**” bertujuan untuk:

1. Mengangkat kisah masyarakat kepulauan Aru dalam menjaga hutan di pulau-pulau kecil Aru.
2. Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat Kepulauan Aru dalam mempertahankan hutan.
3. Mengetahui ancaman ekologis terhadap hilangnya hutan alam di pulau-pulau kecil Aru.

Hasil yang diharapkan

1. Adanya informasi mengenai situasi dan kondisi mengenai ancaman hutan alam di Kepulauan Aru
2. Teridentifikasinya permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan pulau-pulau kecil di kepulauan Aru.
3. Tersampainya informasi terkait rencana pemerintah dalam pengelolaan pulau-pulau kecil di Kepulauan Aru.

Waktu dan tempat

Talk Show dan Press Conference: “Perjuangan Mempertahankan Hutan Alam di Kepulauan Aru” akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Rabu, 17 Desember 2014

Jam : 09.00 WIB sampai dengan selesai

Tempat : Hotel Grand Cemara

Jalan Cemara No.1, Menteng, Jakarta Pusat, Jakarta

Agenda

Waktu	Materi	Pembicara dan Fasilitator
09.00 – 09.30	Registrasi	
09.30 – 09.45	Pembukaan (Kata Sambutan)	Direktur Forest Watch Indonesia (FWI)
09.45 – 10.00	Pemutaran Film	FWI
10.00 – 11.00	Pemaparan Materi: 1. Situasi dan kondisi terkini Kepulauan Aru 2. Ancaman hilangnya keanekaragaman hayati di Kepulauan Aru 3. Perjuangan Masyarakat Adat dalam Menjaga Hutan Alam di Kepulauan Aru 4. Pengelolaan sumber daya laut dan pesisir di pulau-pulau kecil	Pembicara: 1. Forest Watch Indonesia: Muftifathul Barry 2. LIPI - Biologi 3. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN): Rukka Sombolinggi 4. Direktorat Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan: Dr. Sudirman Saad M.Hum Fasilitator: Giorgio Budi Indrarto
11.00 – 11.30	Diskusi dan Tanya jawab	
11.30 – 12.30	<i>Press Conference</i>	Narasumber: 1. Save Aru

		2. Aman 3. FWI
12.30	Penutupan dan makan siang	

Daftar Undangan

1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Direktorat Jendral Kelautan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan
3. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
4. Kementerian PPN/Bappenas
5. LIPI Biologi
6. LIPI Oseanografi
7. PKSPL IPB
8. BIG
9. UKP4
10. Pengurus Besar AMAN
11. Pengurus Wilayah AMAN Maluku
12. Pengurus Wilayah AMAN Sorong Raya
13. Pengurus Wilayah AMAN Maluku Utara
14. Pengurus Wilayah AMAN Sulawesi Tengah
15. Ery Damayanti
16. Imran Amin Makarete
17. Frans Siahaan
18. Kiara
19. Jaring Pela
20. Walhi Eknas
21. ICEL
22. TI Indonesia
23. ICW
24. FITRA
25. EPISTEMA
26. HUMA
27. Yayasan Cinta Mandiri, Sumatera Barat

28. IWGGF
29. BIC
30. Samdhana
31. Pusaka
32. DKN
33. Wetland International
34. EIA
35. WWF
36. Greenpeace
37. CIFOR
38. ICRAF
39. WRI
40. USAID
41. AUSID
42. EU Delegation
43. DFID - UKCCU
44. Ford Foundation
45. GIZ
46. TAF
47. RFN
48. Forest Trend
49. CLUA
50. The Nature Conservation
51. WCS
52. Conservation International
53. Gleen Fredly
54. Koalisi Save Aru
55. Jack Manuputty
56. Media nasional dan internasional